

Studia Akuntansi

ISSN: 2337-9111

Vol. 12 | No. 1

Pengaruh Pandangan Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak

Yani Eka Santi* Usep Siswadi Mike Mega Rahayu*****

*,**,*** Universitas La Tansa Mashiro, Rangkasbitung, Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Keywords: <i>Community Satisfaction, Public View, Accountability, Performance and Public Service</i></p>	<p><i>The existence of a Performance Accountability System in the Lebak Regional Government is a means of responsibility for the performance of the Lebak Regional Government as a public organization to the community as stockholders. The Government Performance Accountability System (SAKIP) is a performance planning system that forms a cycle of determining vision, mission, goals and objectives organizational goals to be achieved listed in the organization's strategic planning. The implementation and outcomes of SAKIP include service to the community in Regional Apparatus Organizations. In this study, the authors examine the outcome or implementation of SAKIP, namely the service of making ID cards at DISDUKCAPIL Lebak as a Regional Apparatus Organization in Lebak Regency. The research method used in this study is a qualitative method. The sample in this study amounted to 49 respondents. The results show that the public's view of the accountability of the performance of the Population and Civil Registry Service is the sig value, for the effect of X1 on Y is $0.595 > 0.05$ and the t value is $-535 < t$ table 2.01290 so it can be concluded that there is no significant effect. significant. sig value, for the effect of X2 on Y is $0.018 < 0.05$ and the t value is $2.462 > 2.01290$ so it can be concluded that it has a positive effect. of $0.030 < 0.05$ and the calculated f value of $3.788 < 3.20$ so that it can be concluded that it has a significant and positive effect simultaneously on public views and public satisfaction with the accountability of the performance of the Civil and Civil Registry.</i></p>
<p>Corresponding Author: yaneesanti@gmail.com</p>	<p>17121100 Keberadaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintahan Daerah Lebak adalah merupakan sarana tanggung jawab kinerja dari Pemerintahan Daerah Lebak sebagai suatu organisasi publik terhadap masyarakat sebagai stockholder. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) merupakan sebuah sistem perencanaan kinerja yang membentuk siklus penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi tersebut. Implementasi dan Outcome dari SAKIP diantaranya adalah adanya pelayanan terhadap masyarakat di Organisasi Perangkat Daerah. Dalam penelitian ini penulis meneliti outcome atau implementasi dari SAKIP yaitu pelayanan pembuatan KTP di DISDUKCAPIL Lebak sebagai Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 49 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan publik terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nilai sig, untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,595 > 0,05$ dan nilai t hitung $-535 < t$ tabel $2,01290$ sehingga dapat disimpulkan bahwa berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. nilai sig, untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,018 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,462 > 2,01290$ sehingga dapat disimpulkan berpengaruh positif. sebesar $0,030 < 0,05$ dan nilai f hitung $3,788 < 3,20$ sehingga dapat disimpulkan signifikan dan berpengaruh positif secara simultan untuk pandangan publik dan kepuasan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja disdukcapil.</p>

Pendahuluan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Disdukcapil sebagai suatu organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI nya). Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pejabat atau pelaksanaan pemerintahan yang telah diberi amanah oleh masyarakat. . Sehingga dalam setiap kegiatan atau pengimplementasikan rencana kerjanya harus dapat diukur dan dievaluasi. Demikian dengan adanya pengukuran dan evaluasi ini , tingkat keberhasilan suatu organisasi tersebut melalui mekanisme yang ada dapat juga diketahui kinerja atau pencapaiannya.

Secara umum diketahui bahwa Pemerintahan baik di pusat maupun daerah bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horizontal di mana pemerintah daerah bertanggungjawab baik terhadap DPR-RI (untuk pemerintahan pusat) dan DPRD (untuk pemerintahan daerah) maupun pada masyarakat luas (dual horizontal accountability).

Pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, hak untuk didengar aspirasinya. Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat luas (Mardiasmo, 2003).

Kepuasan Masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan publik. Harbani Pasolong (2010: 221-222) dalam jurnal Suandi (2019 : 16) menyatakan bahwa semakin baik pemerintah dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat (high trust). Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut. Menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa indonesia dari kata dasar "kerja" yang menerjemahkan kata dari bahasa asing berarti prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja.

Kinerja dalam organisasi,merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Instansi pemerintah Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi visi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ; (2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau sering pula disebut Sistem

AKIP merupakan sebuah sistem perencanaan kinerja yang membentuk siklus penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi tersebut . Komitmen tersebut sudah seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah sebagai wujud keberpihakan pada integritas, profesionalisme serta etos kerja, efisiensi dan efektifitas maupun moral yang tinggi dari setiap penyelenggara negara. Dalam hal ini setiap penyelenggara negara dituntut untuk mampu memikul tanggungjawab untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Apabila tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban maka hal tersebut berpotensi menimbulkan implikasi yang luas.

Namun faktanya, konsep akuntabilitas masih belum sejalan dengan budaya kerja di Indonesia. Banyak pihak mengartikan akuntabilitas hanya terbatas pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan/anggaran saja. Keadaan ini mengakibatkan suatu instansi pemerintahan yang telah melaporkan alokasi dana yang digunakan dianggap sudah mempertanggungjawabkan kegiatannya terlepas dari apakah kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat atau tidak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan kinerja instansi tersebut (Rangkuti, 2018) dalam Arjuna dan Annie Mustika Putri (2019:224).

Produk akhir SAKIP adalah LAKIP yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. yaitu merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Dan menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Sedangkan manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam penerapan system akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah salah satunya menurut (Rokeach, 1973 dalam skripsi Karina Hartanti (2011) dengan judul penelitian Pandangan Publik terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa. menyimpulkan adanya nilai personal yang sangat signifikan. Nilai –nilai personal merupakan suatu keyakinan yang berfungsi sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan cara mengambil keputusan. Selain itu telah disimpulkan pula bahwa terdapat empat faktor besar yang membentuk akuntabilitas yaitu informasi, kepatuhan hukum, nilai nilai personal dan hubungan antara berbagai pemangku kepentingan.

Tanggungjawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pemerintahan . Hal ini amat penting karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan sehingga dapat bersama sama dalam hak dan kesempatan melakukan kontrol terhadap pemerintah.

Menurut menpan.go.id(April, 2021) berbagai upaya dilakukan oleh instansi pemerintah untuk dapat mengimplementasikan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Kolaborasi dan sinergi dari tiap unit kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja. Pemerintah Kabupaten Lebak menjadi salah satu pemerintah daerah yang menyadari elemen penting tersebut. Pada tahun 2020, Kabupaten Lebak mendapatkan predikat Sangat Baik atau BB atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan predikat B untuk implementasi reformasi birokrasi (RB).

Menurut Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Virgojanti “Langkah yang pertama kali yang di lakukan adalah melakukan konsolidasi menyeluruh kepada seluruh OPD untuk berkoordinasi dan bersinergi. Karena keberhasilan pelaksanaan implementasi SAKIP dan RB ini perlu dukungan semua OPD,”. Dijelaskan pula bahwa OPD di lingkup Kabupaten Lebak secara rutin melakukan rapat koordinasi untuk memastikan capaian kinerja dengan tujuan kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk agenda penyelesaian kinerja.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lebak membentuk tim kerja yang memiliki fungsi untuk memantau dan mendampingi OPD dalam merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target indikator dalam SAKIP dan RB. Tim kerja tersebut juga melakukan pendekatan dan pendampingan kepada OPD yang belum dapat melakukan perbaikan. Dengan adanya kolaborasi dan integrasi antar-OPD dalam pelaksanaan SAKIP ini, Pemkab Lebak dapat dengan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Salah satu implementasi dari Sistim Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah adalah pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) terhadap masyarakat yang berhubungan erat dengan kinerja organisasi yang diberikan..

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis Penelitian dan metode ini merupakan evaluasi untuk melihat kesesuaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Lebak dan implementasi LAKIP yang merupakan standar pelaporan akhir AKIP yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Alasan peneliti sendiri memilih metode kualitatif dikarenakan penyelesaian masalah akan lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung bisa berhubungan dengan responden. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat kab.lebak khususnya Rangkasbitung Barat yang membuat eKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Lebak tahun 2020 Populasinya yaitu 96 orang. Karena banyaknya individu dalam populasi penelitian ini, tentu tidak mungkin peneliti mempelajari seluruh populasi dalam populasi karena berbagai faktor. Keterbatasan seperti: keterbatasan sumber daya, tenaga dan waktu. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari populasi untuk penelitian hanya dengan memasang kuesioner. Untuk jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Taro Yamane seperti yang dilaporkan oleh Akdon dan Sahlan (2005: 107). Menjadi minimal 49 orang yang akan dijadikan sampel untuk penelitian, sehingga dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 49 orang warga Rangkasbitung Lebak yang membuat KTP.

Hasil dan Pembahasan

Uji Parsial (uji t)

Uji ini adalah uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak.

Tabel uji t

Model		T	Sig.
	(Constant)	2.565	.014
	Pandangan Publik	-.535	.595
	Kepuasan Masyarakat	2.462	.018

Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,595 > 0,05$ dan nilai t hitung $-535 < t$ tabel $2,01290$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,018 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,462 > 2,01290$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti berpengaruh signifikan

Tabel uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regressi on	94.178	2	47.089	3.788	.030 ^b
Residual	571.822	46	12.431		
Total	666.000	48			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah					
b. Predictors: (Constant), Kepuasan Masyarakat, Pandangan Publik					

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,030 < 0,05$ dan nilai f hitung $3,788 > 3,20$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

Pengaruh Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,595 > 0,05$ dan nilai t hitung $-535 < t$ tabel $2,01290$ sehingga dapat disimpulkan bahwa berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Dari hasil penelitian ini mendukung peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Karina Hartanti (2011) yang berjudul Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah menyatakan bahwa Pandangan Publik tiadak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Pengaruh Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,018 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,462 > 2,01290$ sehingga dapat disimpulkan berpengaruh positif. Dari hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Suandi (2019) yang berjudul Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarkat di Kantor Kecamatan Belitang di OKU Timur bahwa kepuasan masyarakat terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah cukup signifikan

Pengaruh Pandangan Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan Catatan Sipil. diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh Pandangan Publik dan Kepuasan Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar $0,030 < 0,05$ dan nilai f hitung $3,788 < 3,20$ sehingga dapat disimpulkan signifikan dan berpengaruh positif secara simultan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis bahas bahwa Pengaruh Pandangan Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten lebak dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil di kabupaten lebak secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Pengaruh Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten lebak secara parsial signifikan berpengaruh positif. Secara simultan Pandangan Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Instansi Dinas Kependudukan kabupaten lebak signifikan berpengaruh positif.

Daftar Pustaka

- Anggraini, L., Sari, R. N., & Afrina, D. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Anggraini, N. R., & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 6(6).

- Anwar, H., Siswadi, U., & Mufidah, F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Di Provinsi Banten. *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, 10(2).
- Austin, A., Widasari, E., & Fatimah, I. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Di Sekretariat Daerah (SETDA) kab. Lebak. *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, 10(2).
- Darwanis, D., & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 6(2), 150-174.
- Hartanti, K., & CHARIRI, A. (2011). Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Imbaruddin, Amir (2016). Birokrasi Akuntabilitas Kinerja : De La Macca Jalan Borong Raya No. 75 A telp. 08114124721- 08114133371 Makassar.
- Lestari, K., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(2), 53-67.
- Meutia, E. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajianinformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilppd) Kota Padang Panjang. *Publika*, 3(5).
- Mudawannah, S. Determinan Motivasi, Partisipasi Anggaran, dan Komunikasi Terhadap Kinerja Organisasi dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 47-56.
- Munawaroh, S. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati tahun 2010-2015.
- Pratama, M. A. A., Jeddawi, M., & Lukman, S. (2020). Penerapan budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banjarnegara provinsi jawa tengah. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(2), 365-386.
- Putri, A. M. (2019). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(2), 223-232.
- Rusdiana, H.A., Nasihudin (2018). Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung Tlp. (022) 7800525, Fax (022) 7800525.
- Sari, D. L., Hasyim, A., & Nurmalis, Y. (2016). Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 4(4).
- Sari, H. (2020). Akuntabilitas kinerja pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat di unit pelayanan teknis (upt) disdukcapil Banjarmasin timur (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

- Suandi, S. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(2), 13-22.
- Suwignyo, D. (2019). Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lebak). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1), 35-49.
- Wahid,Umaimah (2016). Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru. Jl. Ibu inggit Garnasih No. 31 Bandung 40252
- Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal manajemen dan bisnis sriwijaya*, 13(4), 545-558.